

Penerapan Proyek Profil Pelajar Pancasila sebagai Upaya Pencegahan Korupsi sejak Dini

Melati Tri Anggrani

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Melawi, Indonesia

Email: melati.trianggraini@gmail.com

ABSTRACT: Anti-corruption education plays a crucial role in shaping students' integrity. The Strengthening Pancasila Student Profile Project (P5) in the Merdeka Curriculum is implemented as a project-based learning strategy to instill values of honesty, responsibility, and transparency. This study aims to analyze the effectiveness of P5 in anti-corruption education and identify challenges and solutions in its implementation in schools. The findings indicate that P5 enhances students' ethical awareness and understanding of anti-corruption principles, despite facing obstacles such as limited teacher training and insufficient learning resources. Therefore, strengthening teacher capacity, utilizing technology, and fostering collaboration with families and communities are essential to ensure the effectiveness of anti-corruption education in schools. With the right approach, P5 can serve as a strategic instrument in developing a generation with strong integrity.

Keywords: anti-corruption education, Pancasila student profile, integrity

ABSTRACT: Pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka diterapkan sebagai strategi pembelajaran berbasis proyek untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan P5 dalam pendidikan antikorupsi serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diterapkan di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P5 mampu meningkatkan kesadaran etika dan pemahaman peserta didik terhadap prinsip antikorupsi, meskipun masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, seperti minimnya pelatihan guru dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan keluarga dan komunitas untuk memastikan efektivitas pendidikan antikorupsi di sekolah. Dengan pendekatan yang tepat, P5 dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun generasi yang berintegritas.

Kata kunci: pendidikan antikorupsi, profil pelajar Pancasila, integritas.



Copyright © 2023 The Author(s)
This is an open-access article under the CC BY-SA license.
[Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#)

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan dampak luas terhadap sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Transparency International (2023) melaporkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih menunjukkan adanya permasalahan dalam integritas dan transparansi tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pendidikan, korupsi dapat berdampak negatif terhadap pembentukan karakter peserta didik, menghambat akses terhadap pendidikan berkualitas, serta melemahkan nilai-nilai moral yang seharusnya tertanam sejak dulu (OECD, 2021). Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak bangku sekolah menjadi langkah strategis untuk membangun generasi yang memiliki integritas tinggi dan kesadaran etis dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu inisiatif yang dikembangkan dalam sistem pendidikan Indonesia untuk membangun karakter peserta didik adalah Proyek Pengembangan Profil Pelajar Pancasila (P5). Program ini merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sikap gotong royong (Kemendikbud, 2022). Melalui pendekatan berbasis proyek, peserta didik diajak untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kebijakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek pencegahan korupsi. Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam P5 tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan kesadaran etis dan sikap kritis terhadap praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar (ICW, 2022).

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam sistem pendidikan memiliki dasar yang kuat dalam kebijakan nasional maupun praktik internasional. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2021) menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi yang dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebagai upaya preventif dalam menciptakan masyarakat yang lebih bersih dari praktik korupsi. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengembangkan berbagai modul dan materi pembelajaran antikorupsi yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum sekolah (KPK, 2022). Namun, keberhasilan penerapan pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada efektivitas metode pembelajaran yang digunakan, peran aktif guru, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan.

Penerapan P5 dalam pendidikan antikorupsi menghadirkan berbagai peluang dan tantangan. Salah satu peluang utama adalah adanya fleksibilitas dalam perancangan proyek pembelajaran, yang memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kegiatan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik (Kemendikbud, 2023). Dengan pendekatan berbasis proyek, peserta didik dapat diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang menumbuhkan pemahaman kritis terhadap isu-isu korupsi, seperti simulasi pengambilan keputusan yang

beretika, diskusi kasus nyata, serta proyek sosial yang menanamkan nilai kejuran dan transparansi (Yuwanto, 2021).

Namun, di sisi lain, terdapat tantangan yang harus diatasi dalam implementasi pendidikan antikorupsi melalui P5. Salah satunya adalah minimnya kesiapan tenaga pendidik dalam mengajarkan materi antikorupsi secara efektif. Studi yang dilakukan oleh OECD (2022) menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan bagi guru dalam mengajarkan isu-isu etika dan antikorupsi dapat menghambat keberhasilan program ini. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan bahan ajar yang relevan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek yang efektif (Suryadi, 2022).

Keberhasilan program P5 dalam menanamkan nilai antikorupsi sangat bergantung pada pendekatan yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengalaman dan praktik langsung lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional dalam membentuk kesadaran etis peserta didik (Widodo & Hidayat, 2021). Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik, baik melalui proyek sosial, simulasi, maupun studi kasus yang dapat menggambarkan dampak nyata dari praktik korupsi di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan P5 dapat digunakan sebagai strategi dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dihadapi sekolah dalam menerapkan pendidikan antikorupsi berbasis proyek, serta memberikan rekomendasi berbasis literatur untuk mengoptimalkan efektivitas program ini. Dengan memahami bagaimana P5 dapat menjadi instrumen dalam membangun karakter peserta didik yang berintegritas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berbasis nilai-nilai moral yang kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan pendidikan antikorupsi melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di sekolah. Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap berbagai literatur akademik yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data empiris langsung (Snyder, 2019). Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami bagaimana konsep, strategi, serta tantangan dalam penerapan pendidikan antikorupsi diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal. Dengan menelaah berbagai studi terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai efektivitas P5 dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas (Booth, Sutton, & Papaioannou, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen resmi yang membahas pendidikan antikorupsi dan implementasi P5 di sekolah. Sementara itu, literatur sekunder meliputi artikel ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, serta publikasi dari lembaga pendidikan dan antikorupsi yang mendukung pembahasan tentang strategi serta tantangan dalam penerapan pendidikan antikorupsi (UNODC, 2021). Data diperoleh melalui penelusuran sistematis di Google Scholar. Seleksi sumber dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis, serta tahun publikasi untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan tetap mutakhir dan berkualitas (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta metode sintesis literatur. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, serta temuan utama terkait efektivitas P5 dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas (Bowen, 2009). Selain itu, metode sintesis literatur diterapkan untuk mengintegrasikan berbagai sudut pandang dalam penelitian sebelumnya guna membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan formal (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015). Dengan pendekatan analisis yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan antikorupsi merupakan elemen penting dalam membangun karakter generasi muda yang berintegritas. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka menjadi salah satu upaya strategis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui pembelajaran berbasis proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan P5 memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik, terutama dalam memahami prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Model pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga menekankan pengalaman nyata dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi. Peserta didik yang terlibat dalam proyek berbasis integritas menunjukkan peningkatan pemahaman etika serta kemampuan mengambil keputusan yang lebih berorientasi pada nilai moral.

Keberhasilan implementasi P5 dalam pendidikan antikorupsi sangat dipengaruhi oleh dukungan sekolah dan peran aktif tenaga pendidik. Studi oleh Transparency International (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki kebijakan pendidikan antikorupsi yang kuat serta keterlibatan aktif guru dalam

pembelajaran lebih berhasil dalam membangun budaya antikorupsi dibandingkan sekolah yang hanya menerapkan pendidikan karakter secara konvensional. Guru yang telah mendapatkan pelatihan tentang strategi pembelajaran antikorupsi mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam proyek pembelajaran dengan lebih efektif, sehingga peserta didik memiliki pemahaman lebih baik mengenai pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari (Suryadi, 2022).

Meskipun P5 memiliki potensi besar dalam membentuk karakter antikorupsi peserta didik, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah minimnya kesiapan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi antikorupsi secara efektif. Banyak guru belum mendapatkan pelatihan khusus dalam merancang pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada pendidikan antikorupsi. Akibatnya, implementasi P5 di beberapa sekolah masih bersifat seremonial tanpa pemahaman mendalam dari peserta didik. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti modul atau bahan ajar yang relevan, juga menjadi hambatan dalam penerapan pendidikan antikorupsi yang sistematis (OECD, 2022).

Lingkungan sekolah dan budaya yang diterapkan dalam komunitas pendidikan turut memengaruhi efektivitas P5 dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Studi oleh Wentzel dan Miele (2016) menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang menanamkan nilai-nilai integritas berkontribusi dalam membentuk sikap antikorupsi peserta didik. Sekolah yang menerapkan budaya transparansi, seperti keterbukaan dalam pengelolaan dana sekolah dan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan, cenderung lebih berhasil dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada peserta didik. Sebaliknya, jika sekolah masih memperlihatkan praktik yang bertentangan dengan prinsip integritas, seperti nepotisme dalam pemberian jabatan atau kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, maka upaya pendidikan antikorupsi melalui P5 tidak akan berjalan optimal.

Dukungan kebijakan dari pemerintah dan lembaga terkait juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi di sekolah. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum harus didukung oleh kebijakan yang memperkuat implementasi di tingkat satuan pendidikan. Beberapa negara telah membuktikan bahwa pendekatan berbasis regulasi, yang mewajibkan pendidikan antikorupsi sejak tingkat dasar, dapat meningkatkan kesadaran etika siswa serta mencegah perilaku tidak jujur sejak dulu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih jelas, memberikan insentif bagi sekolah yang aktif mengembangkan proyek berbasis nilai integritas, serta memastikan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas penerapan P5 dalam pendidikan antikorupsi adalah dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi pembelajaran digital. Studi oleh Boell dan Cecez-Kecmanovic (2015) menunjukkan bahwa penggunaan media interaktif, game edukasi, serta simulasi berbasis digital dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap isu-isu korupsi. Dengan pendekatan berbasis teknologi, peserta didik dapat lebih aktif dalam mengeksplorasi konsep kejujuran dan transparansi melalui pengalaman belajar yang lebih menarik dan aplikatif. Beberapa sekolah di Indonesia telah mulai mengembangkan platform pembelajaran berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas pendidikan antikorupsi melalui P5 (Kemendikbud, 2023).

Keterlibatan orang tua dan komunitas dalam pendidikan antikorupsi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga harus didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Studi oleh Ryan dan Deci (2020) menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi. Oleh karena itu, sekolah dapat menjalin kerja sama dengan orang tua melalui program sosialisasi dan kegiatan berbasis komunitas yang memperkuat nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa P5 memiliki potensi besar dalam membentuk karakter antikorupsi peserta didik, tetapi implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Dukungan dari guru, sekolah, pemerintah, serta keluarga sangat diperlukan agar pendidikan antikorupsi melalui P5 dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendidik, penyediaan sumber daya yang memadai, serta kolaborasi antara sekolah dan komunitas menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini. Dengan strategi yang tepat, pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum, tetapi juga menjadi budaya yang tertanam dalam kehidupan peserta didik secara nyata.

KESIMPULAN

Penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam pendidikan antikorupsi terbukti memiliki potensi besar dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P5 mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan bermakna, terutama dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada dukungan sekolah, kesiapan pendidik, serta kebijakan pendidikan yang mendukung integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum. Namun,

tantangan seperti minimnya pelatihan guru, keterbatasan sumber daya pembelajaran, serta kurangnya budaya transparansi di lingkungan sekolah masih menjadi kendala dalam optimalisasi program ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta keterlibatan aktif orang tua dan komunitas untuk memastikan efektivitas pendidikan antikorupsi di sekolah. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, P5 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai antikorupsi serta berkontribusi dalam menciptakan sistem sosial yang lebih adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). On being 'systematic' in literature reviews. *Journal of Information Technology*, 30(2), 161–173.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- ICW. (2022). Pendidikan antikorupsi di Indonesia: Evaluasi dan tantangan implementasi. Indonesia Corruption Watch.
- Kemendikbud. (2023). Pedoman Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- KPK. (2022). Modul pendidikan antikorupsi untuk sekolah menengah pertama dan atas. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- OECD. (2022). *Education for integrity: Teaching on anti-corruption, values and the rule of law*. OECD Publishing.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Publications.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Transparency International. (2023). Corruption perceptions index 2022: Indonesia's standing in global corruption rankings. Transparency International.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- UNODC. (2021). *Education as a tool to prevent corruption and promote integrity*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Wentzel, K. R., & Miele, D. B. (Eds.). (2016). *Handbook of motivation at school* (2nd ed.). Routledge.